BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Kompas
Subyek : AMDAL
Edisi : 15 Mei 2008
Halaman : 24

TN Sentarum Dikepung Perkebunan Tanpa Amdal

Pontianak, Kompas - Sekitar 300.000 hektar dari 400.000 hektar kawasan penyangga Taman Nasional Danau Sentarum atau TNDS di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, kini dikuasai 18 perusahaan yang memiliki izin konsesi perkebunan kelapa sawit tanpa amdal. Sebagian lahan bahkan mulai dibersihkan dan ditanami.

Koordinator Isu Konversi Hutan WWF Indonesia-Kalimantan Barat Haryono mengungkapkan hal itu, Rabu (14/5). ”Pengeluaran izin perkebunan sawit tanpa amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) itu ironis. Pasalnya, sebagian perusahaan yang mendapatkan izin adalah yang mendorong pengelolaan sawit lestari. Komitmen memerhatikan lingkungan yang selama ini mereka kampanyekan, di lapangan ternyata tidak berlaku,” paparnya.

Pemberian izin perkebunan tanpa amdal tersebut tidak sejalan dengan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Menurut peraturan itu, izin usaha perkebunan ataupun izin lokasi perkebunan yang dikeluarkan bupati hanya boleh dikeluarkan jika sudah ada amdal.

Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kalimantan Barat (Kalbar) Tri budiarto yang dikonfirmasi tentang hal tersebut mengakui, Pemerintah Provinsi Kalbar belum mengeluarkan izin amdal bagi perkebunan sawit di sekitar TNDS. ”(Jadi) Izin perkebunan sawit yang tanpa didahului pembuatan amdal di kemudian hari bisa saja dipersoalkan (secara hukum),” tuturnya.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 40 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Amdal, penilaian amdal perkebunan sawit menjadi kewenangan pemerintah provinsi, yang pelaksananya Bapedalda.

Terkait dengan sawit, dari Palembang dilaporkan, perluasan perkebunan sawit di Sumatera Selatan terhambat keterbatasan bibit. Kepala Dinas Perkebunan Sumsel Syamuil Chatib mengatakan, kondisi ini cukup memprihatinkan mengingat banyak investor berminat berinvestasi di perkebunan sawit. (WAD/WHY)

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup